

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah antara lain pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah (Amirullah et al, 2010).

Namun pada kenyataannya, permasalahan didalam laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik/masyarakat masih menyisakan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Seperti yang dikutip dari media online, diungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Semarang masih terdapat penyimpangan penggunaan keuangan Negara, penyimpangan yang terjadi hingga saat ini adalah masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurut *tagar.id* contoh kasus KKN terjadi di

lingkungan Jawa Tengah pada tahun 2019-2020 adalah Kasus Mantan Bupati Purbalingga, Bupati Kudus non Aktif, Mantan Bupati Sragen. Sehingga diperlukan pembenahan data atau laporan yang berkaitan dengan keuangan, terutama untuk menghindari penyimpangan tersebut. Walaupun Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan tata kelola pemerintah, namun korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja terjadi. Permasalahan lain yang timbul adalah terlambatnya penyampaian laporan keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut disebabkan adanya kendala di beberapa sektor, diantaranya dokumentasi maupun sinerginitas (DPKAD kota Semarang).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, perbedaannya terletak pada penempatan posisinya, yaitu kalau standar akuntansi pemerintahan lebih kepada dasar aturan keuangan daerah yang mengatur daerah itu semestinya, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah lebih kepada seperangkat prosedur yang mengatur segala proses dan kegiatan yang ada pada pencatatan keuangan daerah (Sanjaya, 2017).

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah di atur dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh kompetensi SDM, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan kualitas review yang baik (Maulana, dkk, 2017).

Kompetensi staf akuntansi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Menurut Cris Kuntadi, 2009 kompetensi umum yang perlu dimiliki oleh pelaksana review adalah pemahaman mengenai akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik/pemerintahan termasuk pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemahaman mengenai sistem pengendalian intern. Karena pelaksanaan review berbeda dengan audit. SPKN yang diterbitkan BPK menjadi standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. SPKN dimaksudkan untuk menjadi patokan bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar dapat memelihara kompetensi, integritas, obyektivitas dan independensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan yang dilaksanakannya. Semakin kompeten staf akuntansi

pengawai negeri sipil, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Yunita, 2017).

Robbins dan Judge (2007) mendefenisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dan akan berusaha untuk memberikan hasil kinerja yang lebih baik, seperti memberikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Sanjaya, 2017). Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spriritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan yang besar akan sulit terlaksana. Konsep komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang peranan penting dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai organisasi (Mowday et al., 1979). Berdasarkan hasil penelitian,

komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung menurunkan senjangan anggaran dan signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ditugaskan melaksanakan review atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terhadap informasi yang disajikan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 pada Pasal 33 ayat (3). review merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh APIP selain audit, evaluasi, konsultasi dan kegiatan pengawasan lain. review dilaksanakan dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Laporan keuangan adalah bukti pertanggungjawaban yang diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerahnya. Suatu komitmen organisasi menunjukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam organisasi. Komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjanya, sehingga kualitas LKPD semakin meningkat (Aranya *at al*, 1981)

Pengendalian Internal dilakukan untuk melindungi kekayaan organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi/Instansi Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Yunita, 2017).

Riset gap pengaruh variabel kompetensi terhadap kualitas laporna keuangan pemerintah daerah, penelitian Amirrullah et al (2010), Hari Raditya Nugroho (2016), Yunita (2017), Maulana, dkk (2017), membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian T. Asri Yunita (2015), Kusuma dan Darmansyah (2017), Aditya Sanjaya (2017), yang memberikan hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Riset gap pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kualitas laporna keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian Amirrullah et al (2010), Maulana, dkk (2017), Muhammad Ikhsan (2018), membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Widhi, dkk (2015), Sanjaya (2017), Hasmi (2018),

yang memberikan hasil komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Riset gap pengaruh kualitas review terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hasil penelitian Widyarini (2015), Hari Raditya Nugroho (2016), Maulana, et al (2017), Muhammad Ikhsan (2018) menyebutkan bahwa kualitas review berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017), Muhammad Ikhsan (2018), yang menyatakan kualitas review tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Riset gap pengaruh variabel pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian Maulana, dkk (2017), Kesuma, et al (2017), Aditya Sanjaya (2017), Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka (2018), membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Yunita (2015), Muhammad Ikhsan (2018), yang memberikan hasil sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maulana et al (2017), yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD. Yang berbeda dengan penelitian sekarang adalah 1) pengujian pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang tidak dilakukan oleh Maulana et al (2017).

2) Lokasi penelitian di BPKP Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda dan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah kualitas review berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas review terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai analisis pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, kualitas review, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta dapat digunakan sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi BPKP

Dalam penelitian ini diharapkan membantu untuk mengevaluasi kinerja para auditor agar lebih independent dan dalam memberikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi referensi dan landasan bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti kembali dengan kajian yang sama yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Darwanis & Yahya, M. R. 2010. Pengaruh Kompetensi Auditor dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Inspektorat Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3 (2): 130-154.
- Astika Rahmawati, dkk. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* (JEBA). Volume 20 Nomor 2 Tahun 2018.
- Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah. 2017. Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika* Volume 1 Nomor 2 Desember 2017.
- Eda, A., Karamoy, H. & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Prosedur Reviu, Kompetensi dan Jangka Waktu Pelaksanaan Terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Se-Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8 (1): 222-232.
- Hari Raditya Nugroho. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, Jr., J.H. 1985. *Organizations*. 5th Edition. Business Publication, Inc.
- Hullah. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterlandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, Hal 210-218.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan 2. Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Kalbers, Lawrence P., dan Forgaty, Timothy J. 1995, Professionalism Its Consequences: A Study of Internal Auditors, *Auditing: A Journal of Practice*. Vol. 14. No. 1 Pg.64-86.

- Kesuma, Indra, Nadirsyah, Darwanis. 2014. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1.
- Krisnawati. 2012. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika auditor Terhadap Kualitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Sepuluh Lombok), *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 8 No. 3 Nop. 2012.
- Kuntadi, Cris. 2009, Seminar dan Diskusi Panel : Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Dalam Pelaksanaan reuiu Laporan Keuangan, Jakarta ABFI Isntitute Perbanas.
- Manaf, I. A., Arfan, M., & Darwanis. 2014. Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*.Vol.3 (4): 23-35.
- Maulana, Aditya. 2017. Determinan Kualitas Reviu dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Economia*, Volume 13, Nomor 2.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. 2007. The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*. Vol 14: 224-247.
- Muhammad Ikhsan. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan. Repositori Institusi USU.
- Pinder, Gary. 2000. *Human Resource Mamanjement*. London. Pretice- Hall. Inc. A Daromount Communication Company.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Riduwan dan Surya. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi* Vol. 2 No. 1.
- Risdhayanti Nur Sholikhah, dkk. 2017. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 Edisi Khusus April 2016.

- Robbins, SP. 2006. *Perilaku Organisasi- Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. PT. Prenhallindo. Jakarta
- Sanjaya, Aditya. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). *JOM Fekon* Vol.4 No.1 (Februari) 2017.
- Sri Lastanti, Hexana, 2005, Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol. 5 No. 1 April 2005. Hal. 85-97.
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Alfa Beta. Bandung.
- Umar, Husein. 2007. *Metode Penelitian*. Gramedia. Jakarta.
- Widhi, Nugroho, Saputro dan Setyawati, Erma. 2015. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19, Nomor 1.
- Widyarini, K. 2015. Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana Reviu pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali). Tesis. Universitas Udayana Denpasar.
- Yunita, T Asri. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf akuntansi terhadap Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.